

KASAK - KUSUK

REBUTAN KURSI DIRUT

Stop Politisasi BUMN

KINERJA Meneg BUMN Sugiharto kian jadi sorotan.

Pasalnya, pengangkatan direksi di sejumlah BUMN dinilai tidak bisa berjalan baik dan profesional.

"Bahkan banyak bernuansa KKN. Kalau beliau tidak mampu sebaiknya ya mundur saja," kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Syaiful Anwar di Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan kinerja Meneg BUMN ambruk. Kepentingan politik sering mewarnai langkah-langkahnya. Hal itu terbukti dalam langkah-langkah mengisi kursi Dirut PLN. "Ini tidak ubahnya dengan kinerja BUMN zaman kabinet yang dulu. Jangan BUMN jadi sapi perahan. Kasihan SBY. Dia sedang menata dengan baik tapi ada kelompok tertentu yang sibuk cari duit untuk kepentingan Pemilu 2009," katanya.

Menurut Ketua Aliansi Rakyat Jaringan Kebangsaan itu, sebagai seorang Meneg BUMN harus mampu menggerakkan sektor riil. Namun nyatanya sektor riil sampai saat ini seperti jalan di tempat.

"Jangan hanya lips service saja dong. Kok yang dipentingkan hanya kelompok tertentu saja. Jangan yang diangkat jadi direksi tidak jelas track recordnya," tandasnya.

Sementara itu, surat Meneg BUMN Sugiharto kembali dipertanyakan karena diduga berbau praktek KKN. Surat yang ditujukan ke anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX dan X bernomor S-141/MBU/2006 tertanggal 24 April 2006 dan S-142/MBU/2006 tertanggal 24 April 2006 berkaitan pelaksanaan tugas anggota direksi yang masa jabatannya sudah berakhir. "Surat Meneg BUMN itu selain aneh, berani, juga dapat dipersepsikan sarat mengandung unsur KKN. Substansi isi surat tersebut hanya menyatakan agar para direksi tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai direksi sampai ditetapkannya anggota direksi yang definitif. Padahal, masa tugas anggota direksi PTPN X berakhir pada 30 April 2006, berarti, hanya tinggal 6 hari lagi, keluarlah surat Meneg BUMN itu," kata Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), M Julian Manurung kepada wartawan di Jakarta, kemarin. ■ FIK